

RINGKASAN EKSEKUTIF

KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2020



RINGKASAN EKSEKUTIF
KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2020

ISBN: 978-623-7914-53-2 (PDF)

Katalog: 3205026.65

Nomor Publikasi: 65000.2126

Ukuran Buku: 18,2 x 25,71 cm

Jumlah Halaman: xii + 33 halaman

Naskah:

BPS Provinsi Kalimantan Utara

Penyunting:

BPS Provinsi Kalimantan Utara

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Kalimantan Utara

Ilustrasi Kover:

Modifikasi freepik.com

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari **Badan Pusat Statistik**.

TIM PENYUSUN

RINGKASAN EKSEKUTIF

KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2020

Penanggung Jawab:

Tina Wahyufitri, S.Si., M.Si.

Penyunting:

Basran, SE

Penulis:

Dede Kurniyawan, SST

Pengolah Data:

Dede Kurniyawan, SST

Desain Kover:

Dede Kurniyawan, SST

<https://kaltara.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

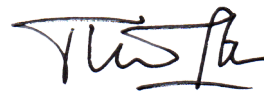
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan antara lain tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Ringkasan Eksekutif Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara 2020 merupakan ringkasan eksekutif yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara. Ringkasan eksekutif ini memuat data/informasi kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara selama Maret - September 2020, yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Data yang disajikan dalam ringkasan eksekutif ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Disadari bahwa ringkasan eksekutif ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Ringkasan eksekutif ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta.

Kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penyusunan dan penerbitan ringkasan eksekutif ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan ringkasan eksekutif ini di masa mendatang sangat kami harapkan. Semoga ringkasan eksekutif ini bermanfaat.

Tanjung Selor, Juni 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Utara



TINA WAHYUFITRI, S.SI., M.SI.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	xi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
I. Latar Belakang	3
II. Tujuan dan Manfaat	4
III. Ruang Lingkup	5
IV. Sumber Data	5
V. Konsep dan Definisi	5
Bab 2 Ulasan.....	11
Perkembangan Indikator kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	13
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi Kalimantan Utara	15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Utara	19
Karakteristik Penduduk Miskin.....	21
Bab 3 Kesimpulan	29
Kesimpulan.....	29
Daftar Pustaka	33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan Indikator Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, Maret dan September 2020	13
Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Utara, 2020	21
Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Pekerjaan Utara di Provinsi Kalimantan Utara, 2020	22
Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara, 2020	24
Tabel 5. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Komoditas Makanan Menurut Status Miskin di Provinsi Kalimantan Utara, 2020	25
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/ Bersama di Provinsi Kalimantan Utara, 2020 .	26
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga miskin yang Menerima dan Memanfaatkan BPNT/ Program Sembako, Rata-rata Jumlah dan Harga Beras yang Dibeli Selama 4 Bulan Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara, 2020	27

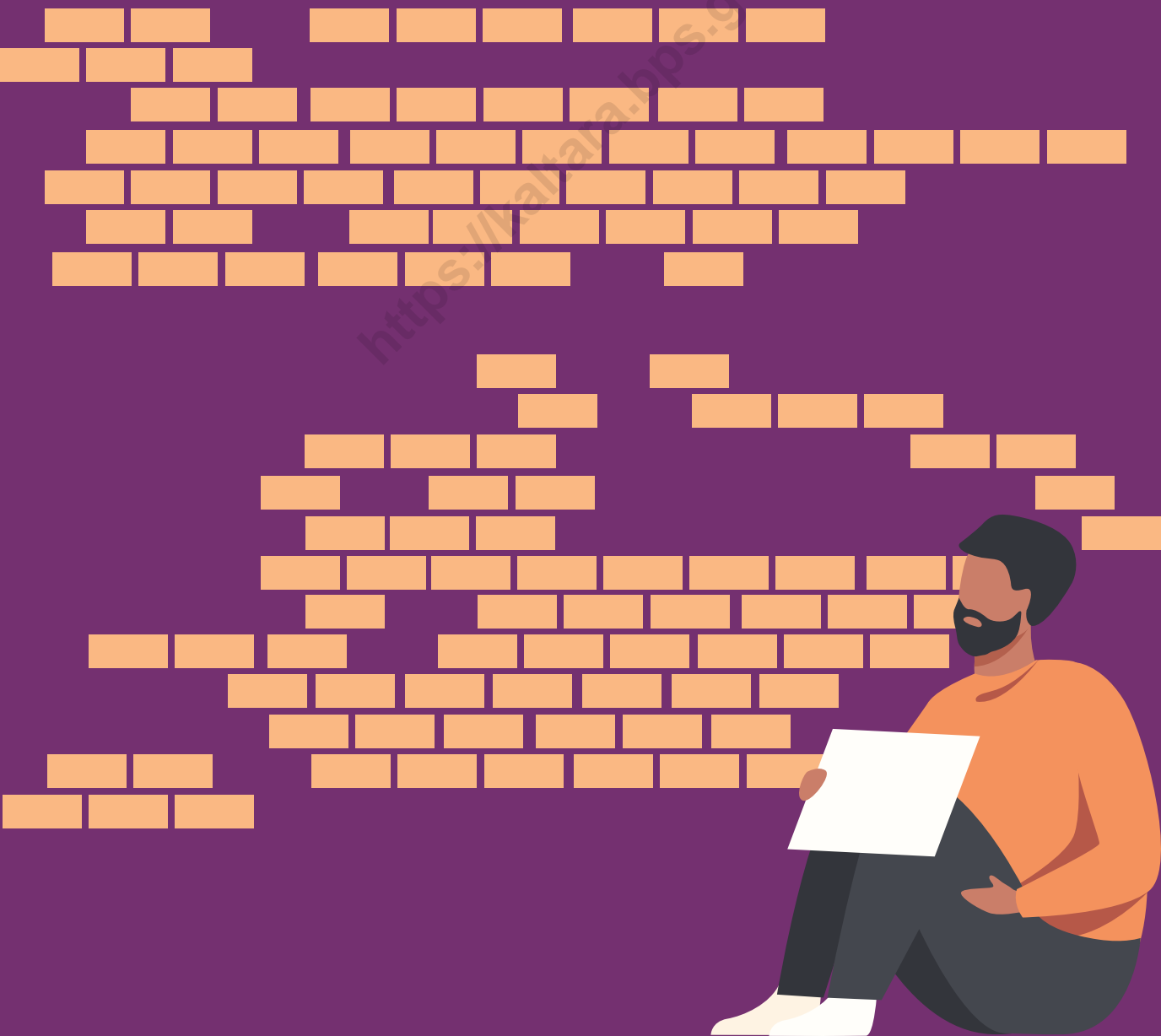
DAFTAR GAMBAR

Halaman

- Gambar 1.** Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara (Rp/ Kapita/ Bulan), Maret 2018 – September 2020 14
- Gambar 2.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P0) di Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2018 – September 2020 16
- Gambar 3.** Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Provinsi-Provinsi di Indonesia, September 2020 18
- Gambar 4.** Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2018 – September 2020 20

BAB 1

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang selalu dihadapi oleh hampir semua wilayah di Indonesia, yang menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Utara. Pengentasan kemiskinan menjadi target utama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang tertuang pada tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.

Pengukuran kemiskinan yang akurat dan dapat dipercaya merupakan instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan

persentase penduduk miskin mencakup periode 1976 – 1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Penghitungan tingkat kemiskinan telah melalui proses yang cukup panjang hingga dapat disajikan setiap tahunnya.

Sejak tahun 2011, BPS menghitung tingkat kemiskinan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu Bulan Maret dan September untuk tingkat nasional dan provinsi berdasarkan hasil Susenas Maret dan September. Sedangkan tingkat kabupaten/kota, penghitungan tingkat kemiskinan hanya dilakukan sekali dalam setahun berdasarkan hasil Susenas Maret.

Data kemiskinan yang disajikan BPS yang bersumber dari data Susenas tersebut merupakan data kemiskinan makro, artinya data kemiskinan yang hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi hasil survei. Kemiskinan makro, tidak dapat menunjukkan “siapa” dan “dimana” penduduk miskin.

II. Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi ringkasan eksekutif ini adalah untuk menyajikan kondisi kemiskinan di Provinsi

Kalimantan Utara kondisi Maret dan September 2020 dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

III. Ruang Lingkup

Publikasi ringkasan eksekutif ini menyajikan data dan informasi kemiskinan yang meliputi:

- Garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara
- Jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara
- Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara
- Kualitas kemiskinan yang ditunjukkan melalui indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2).

IV. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan adalah data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September 2020.

V. Konsep dan Definisi

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

2. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).
4. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
5. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

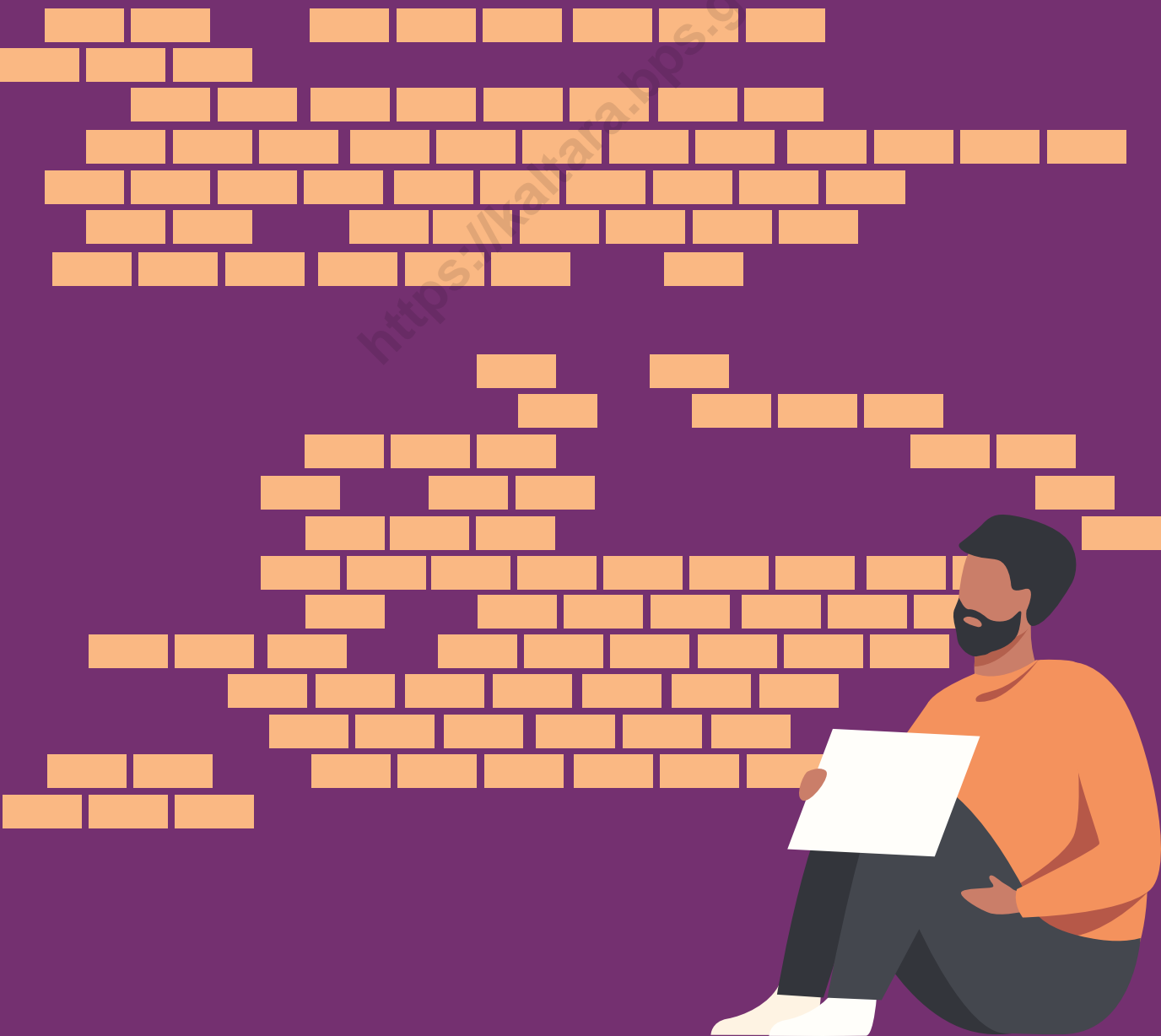
6. *Head Count Index* (HCI- P_0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan.
7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan.
8. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
9. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota adalah data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September. Jumlah sampel Provinsi Kalimantan Utara pada Susenas Maret 2020 sebanyak 2.730 rumah tangga dan pada Susenas September 2020 sebanyak 520 rumah tangga yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
10. Sejak tahun 2015 terjadi pergeseran sampel besar dari Susenas September ke Susenas Maret, sehingga hasil Susenas Maret (termasuk angka kemiskinan) dapat mewakili sampai level kabupaten/ kota, sedangkan Suenas September hanya sampai level provinsi.

11. Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas.
12. Bekerja adalah kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama 1 jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.
13. Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.
14. Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan + non makanan).
15. Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber utama air minum dan air yang tidak sustan (air hujan), airt terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/ cuci/ dan lain-lain yang digunakan berasal dari air terlindung.
16. Rumah tangga pengguna jamban sendiri/ bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

17. Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra) adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras sejahtera (Rastra). Program Rastra (sebelumnya disebut program Beras Miskin/Raskin) adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.
18. Rumah Tangga Miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah rumah tangga miskin yang menerima bantuan sosial pangan BPNT yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerja sama dengan Bank Penyalur. Bahan pangan dalam program BPNT ini adalah beras dan/ atau telur.

BAB 2

ULASAN



ULASAN

Perkembangan Indikator kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 701,8 ribu jiwa yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota dengan kondisi ekonomi masing-masing penduduknya yang beragam.

Tabel 1. Perkembangan Indikator Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, Maret dan September 2020

Indikator Kemiskinan (1)	2020	
	Maret (2)	September (3)
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	681 035	694 964
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	51,79	52,70
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,80	7,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,839	0,859
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,169	0,186

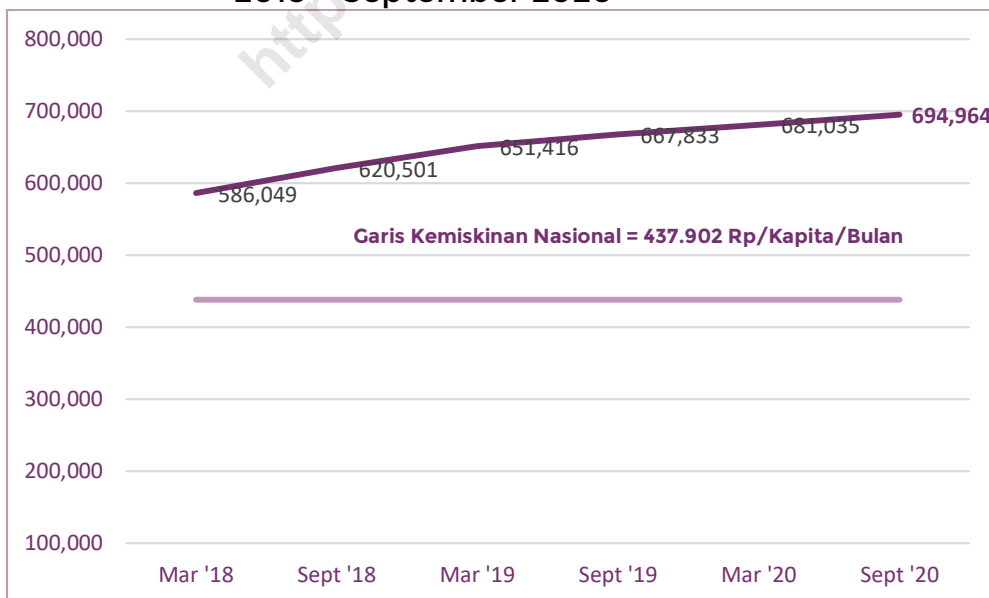
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

Pada September 2020, Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Kalimantan Utara mencapai 694.964 rupiah/kapita/bulan.

Terjadi kenaikan sebesar 2,05 persen bila dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Maret 2020. Kenaikan angka Garis Kemiskinan ini menunjukkan bahwa standar penduduk Provinsi Kalimantan Utara untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari agar tidak menjadi miskin semakin meningkat dari Bulan Maret ke September 2020.

Dari gambar 1 di bawah ini, dapat dilihat bahwa dalam periode tiga tahun terakhir (2018 - 2020), Garis Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami kenaikan yaitu dari 586.049 rupiah/kapita/bulan pada Maret 2018 menjadi 694.964 rupiah/kapita/bulan pada September 2020.

Gambar 1. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara (Rp/Kapita/Bulan), Maret 2018 - September 2020

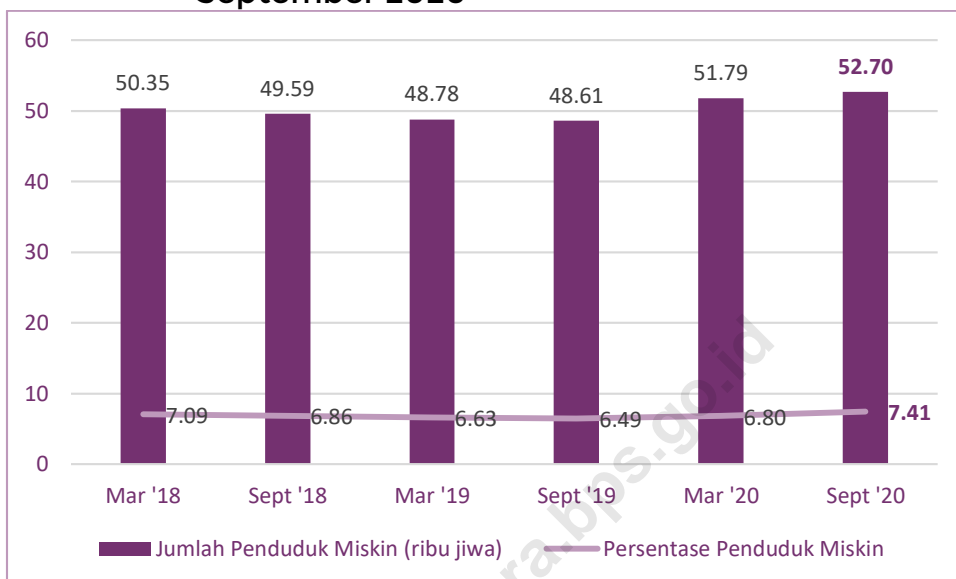


Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara September 2020 berada jauh cukup signifikan di atas Garis Kemiskinan Nasional yang sebesar 437.902 Rupiah/Kapita/Bulan.

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin (P₀) Provinsi Kalimantan Utara

Pada September 2020, penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 52,70 ribu jiwa, sedangkan pada Maret 2020, penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 51,79 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sejumlah 0,9 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara pada September 2020 mencapai 7,41 persen, sedangkan pada Maret 2020 mencapai 6,80 persen. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,61 persen poin jika dibandingkan antara Bulan September dan Maret 2020.

Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P_0) di Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2018 - September 2020



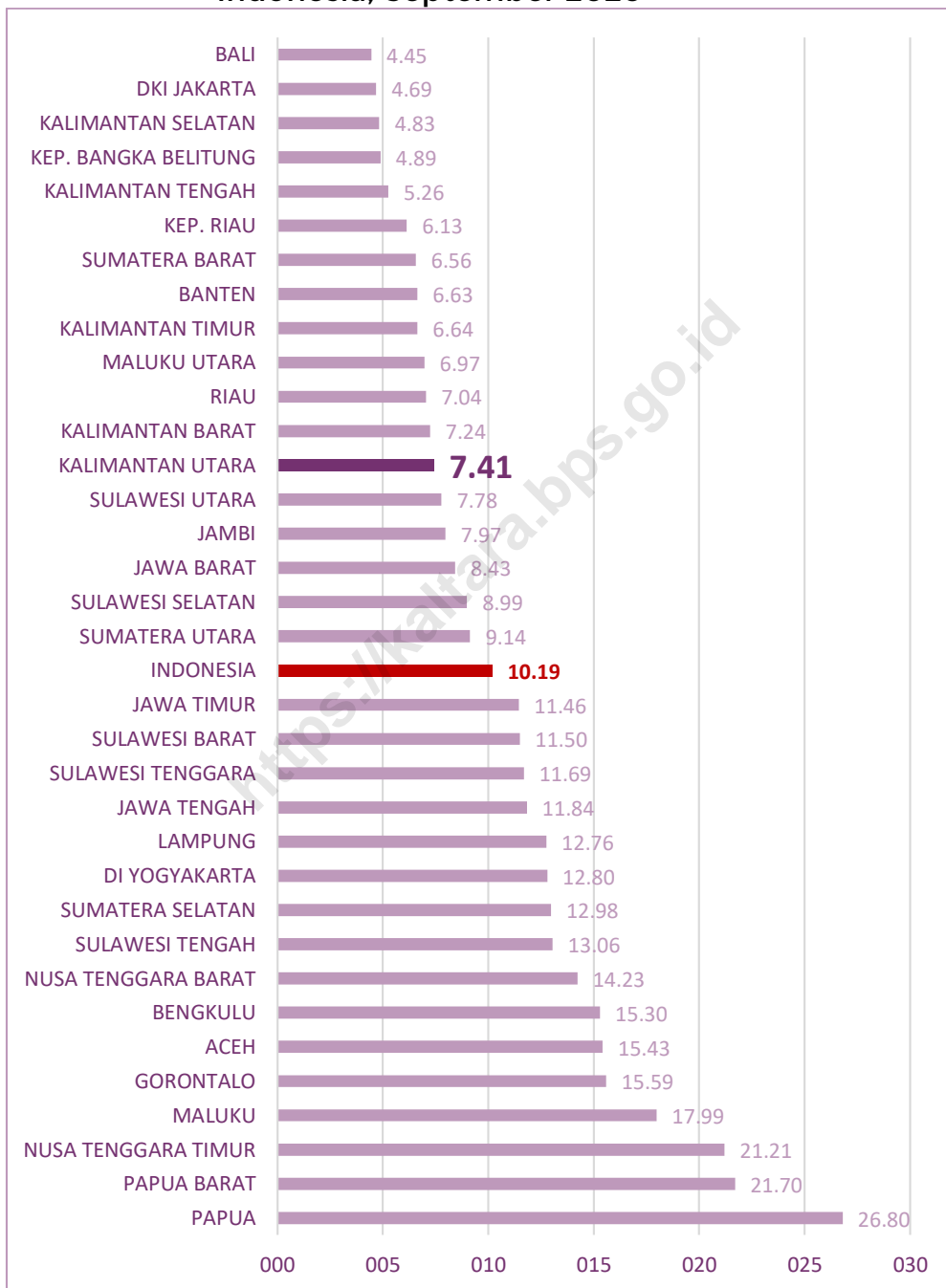
Selama tiga tahun terakhir, mulai dari Maret 2018 hingga September 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara bergerak secara fluktuatif. Pada Maret 2018 hingga September 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami penurunan. Penduduk miskin yang semula berjumlah 50,35 ribu jiwa pada Maret 2018 turun menjadi 48,61 ribu jiwa pada September 2019. Penurunan penduduk miskin tertinggi terjadi pada Maret 2019 yang turun sejumlah 0,81 ribu jiwa dari September 2018 (turun sebesar 0,23 persen poin).

Penduduk miskin mengalami peningkatan mulai September 2019 hingga September 2020. Pada September 2019, penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 48,61

ribu jiwa (6,49 persen). Terjadi peningkatan sejumlah 3,18 ribu jiwa jika dibandingkan antara penduduk miskin pada September 2019 dengan Maret 2020 (perubahan dari 48,61 ribu jiwa pada September 2019 menjadi 51,79 ribu jiwa pada Maret 2020) atau peningkatan sebesar 0,31 persen poin. Peningkatan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara terus terjadi pada periode Maret hingga September 2020 yang mencapai 0,91 ribu jiwa (perubahan dari 51,79 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 52,70 ribu jiwa pada September 2020). Salah satu penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Secara nasional, persentase penduduk miskin September 2020 di Provinsi Kalimantan Utara menempati peringkat ke-13 dengan persentase penduduk miskin terkecil bila dibandingkan dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin (P₀) Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Provinsi-Provinsi di Indonesia, September 2020



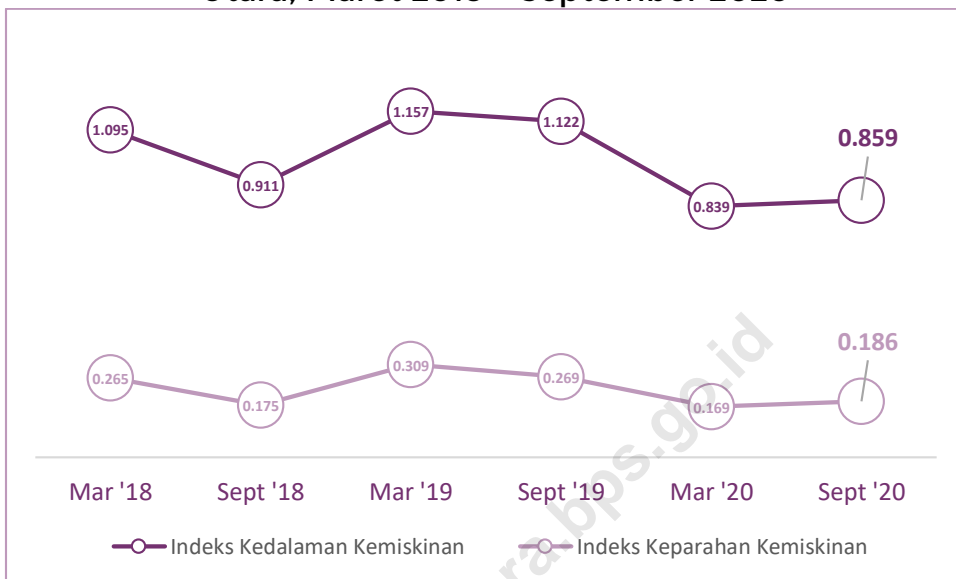
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Kalimantan Utara

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga seharusnya dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 0,859 atau mengalami peningkatan dari Maret 2020 sebesar 0,02 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara semakin menjauh dari Garis Kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami peningkatan di Provinsi Kalimantan Utara dari 0,169 pada Maret 2020 menjadi 0,186 pada September 2020 (peningkatan sebesar 0,02 poin). Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara semakin melebar.

Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2018 - September 2020



Selama periode Maret 2018 hingga September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Kalimantan Utara bergerak cukup fluktuatif, terutama dari September 2019 ke Maret 2020 yang mengalami penurunan yang tajam. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa pada tahun yang mengalami penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara semakin mendekati Garis Kemiskinan. Selama Maret 2018 hingga September 2020, nilai P_1 terendah terjadi pada Maret 2020 yaitu sebesar 0,839, yang dapat diartikan bahwa selama periode Maret 2018 hingga September 2020, peluang terbesar penduduk miskin untuk keluar dari Garis Kemiskinan terjadi pada Maret 2020.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami pergerakan yang fluktuatif dari Maret 2018 hingga September 2020. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara pada periode tertentu mengalami penyempitan dan pada periode tertentu mengalami perluasan. Nilai P_2 terendah terjadi pada Maret 2020 yaitu sebesar 0,169. Hal ini menunjukkan bahwa selama Maret 2018 hingga September 2020, tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri paling merata terjadi pada Maret 2020.

Karakteristik Penduduk Miskin

Dengan melihat karakteristik penduduk miskin, maka hal ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar lebih fokus dalam penentuan program pengentasan kemiskinan, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	2020 (%) (2)
Tidak Tamat SD	26,09
Tamat SD/ SLTP	48,98
Tamat SLTA ke Atas	24,93

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

Tingkat pendidikan berperan dalam memengaruhi angka kemiskinan. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang lebih rendah untuk menjadi miskin. Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara yang berusia 15 tahun ke atas didominasi oleh mereka yang berpendidikan tamat SD atau tamat SLTP yaitu sebanyak 48,98 persen pada tahun 2020. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para penentu kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan bahwa program pengentasan kemiskinan bagi penduduk miskin dengan pendidikan tamat SD atau tamat SLTP dapat menjadi prioritas utama di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Pekerjaan Utara di Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Status Pekerjaan Utama (1)	2020 (%) (2)
Tidak Bekerja	47,84
Bekerja di Sektor Informal	31,79
Bekerja di Sektor Formal	20,37

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

Ditinjau dari status pekerjaan utama, pada sebagian besar penduduk miskin berstatus sebagai pekerja informal. Pekerja informal merupakan penduduk yang status/ kedudukan dalam pekerjaannya adalah berusaha sendiri, berusaha

dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/ tidak dibayar. Sedangkan pekerja formal merupakan penduduk yang status/ kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/ buruh dibayar atau buruh/ karyawan/ pegawai.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, hampir sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 47,84 persen adalah tidak bekerja, kemudian yang bekerja di sektor informal sebesar 31,79 persen dan bekerja di sektor formal sebesar 20,37 persen.

Karakteristik ketenagakerjaan lainnya yang dapat ditunjukkan di antara penduduk miskin adalah lapangan pekerjaan atau sektor sumber penghasilan rumah tangga. Dilihat dari lapangan pekerjaan atau sektor sumber penghasilan rumah tangga, 31,21 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 bekerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin sering kali masih melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani, dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan.

Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Lapangan Pekerjaan (1)	2020 (%) (2)
Tidak Bekerja	47,84
Bekerja di Sektor Pertanian	31,21
Bekerja di Sektor Non-Pertanian	20,95

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah hampir sebagian besar, yaitu sebanyak 47,84 persen pada tahun 2020 penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki pekerjaan. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan terkait penyediaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan. Bila dikaitkan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka lapangan pekerjaan yang perlu disediakan adalah lapangan pekerjaan bagi penduduk miskin dengan pendidikan tamat SD atau tamat SLTP.

Tabel 5. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Komoditas Makanan Menurut Status Miskin di Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Status Miskin (1)	2020 (%) (2)
Miskin	56,15
Tidak Miskin	51,48
Miskin + Tidak Miskin	49,30

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan suatu rumah tangga. Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut kelompok komoditasnya, yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran per kapita sebulan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk membiayai komoditi makanan pada tahun 2020. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara untuk komoditi makanan sebesar 56,15 persen pada tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penduduk yang tidak masuk ke dalam garis kemiskinan. Persentase pengeluaran per kapita sebulan

penduduk yang tidak miskin untuk makanan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 51,48 persen pada tahun 2020.

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/ Bersama di Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Status Penggunaan Air dan Jamban	2020 (%)
(1)	(2)
Penggunaan Air Layak	67,81
Penggunaan Jamban Sendiri/ Bersama	86,64

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

Air layak yang dapat diakses oleh penduduk miskin menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang perlu diperhatikan. Asupan air yang cukup untuk tubuh sangat diperlukan untuk kesehatan. Setiap harinya air layak juga dibutuhkan untuk memasak, mandi, mencuci, dan dapat digunakan untuk bahan baku kebutuhan lainnya.

Pada tahun 2020, 67,81 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan air layak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara telah mendapatkan akses air layak untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama, jamban komunal, jamban umum, dan tidak ada

jamban. Pada tahun 2020, 86,64 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan jamban sendiri/bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara telah menggunakan jamban sendiri/bersama.

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga miskin yang Menerima dan Memanfaatkan BPNT/ Program Sembako, Rata-rata Jumlah dan Harga Beras yang Dibeli Selama 4 Bulan Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Uraian	2020
(1)	(2)
Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Program (%)	26,85
Rata-rata Jumlah Beras (kg)	8,69
Rata-rata Harga Beras (Rp)	11 332

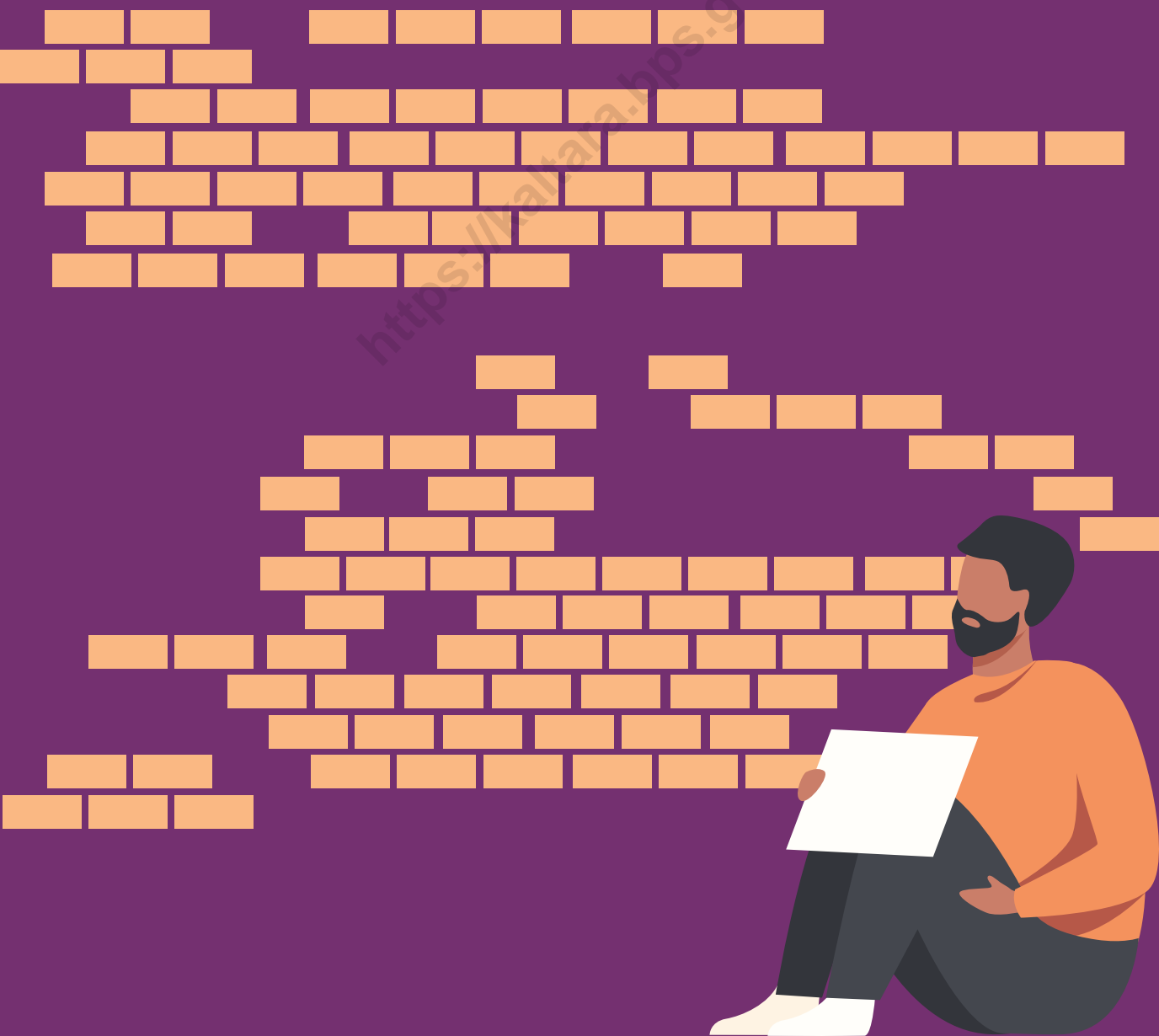
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020

Sejak tahun 2017, penyaluran beras bersubsidi mulai dialihkan melalui Program Bantuan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan bantuan sosial pangan senilai Rp 110.000,- yang disalurkan dalam bentuk nontunai dari Pemerintah kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Pada tahun 2019, BPNT digunakan hanya untuk membeli beras dan/ atau telur di *e-warong*.

Pada tahun 2020, 26,85 persen rumah tangga miskin di Provinsi Kalimantan Utara merupakan rumah tangga miskin yang menerima bantuan Pemerintah melalui program BPNT. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar rumah tangga miskin yang tidak menerima Rastra/BPNT. Rata-rata jumlah beras yang dibeli selama empat bulan terakhir oleh rumah tangga miskin penerima program BPNT adalah sebesar 8,69 kilogram dengan rata-rata harga Rp 11.332,-.

BAB 3

KESIMPULAN



KESIMPULAN

Selama periode Maret 2018 hingga September 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara bergerak fluktuatif. Penurunan jumlah penduduk miskin terjadi pada Maret 2018 hingga September 2019. Lalu, pada Maret 2020, mulai terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara hingga September 2020 yang salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19.

Beberapa indikator kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara masih menunjukkan hasil yang belum optimal selama tahun 2020 yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, sehingga program pengentasan kemiskinan masih perlu diupayakan dari waktu ke waktu dengan beberapa penyesuaian sebagai akibat adanya pandemi Covid-19, dengan harapan target utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dicapai.

Dilihat dari karakteristiknya, penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh mereka yang berpendidikan tamat SD atau tamat SLTP. Selain itu, sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal, dan bekerja di sektor pertanian.

Sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki pekerjaan (47,84 persen). Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait penyediaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu bentuk program pengentasan kemiskinan, dengan sasaran lapangan pekerjaan utama untuk penduduk miskin yang memiliki pendidikan tamat SD atau tamat SLTP.

Dilihat dari indikator rumah sehat, 67,81 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan air layak dan 86,64 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan jamban sendiri/ bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin telah mendapatkan akses air layak dan telah menggunakan jamban sendiri/ bersama.

Terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hanya 26,85 persen rumah tangga miskin di Provinsi Kalimantan Utara yang menerima BPNT pada tahun 2020. Pemutakhiran data penduduk miskin perlu dilakukan secara terus-menerus sehingga bantuan tersebut semakin tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2020*; <https://bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. *Ringkasan Eksekutif Kemiskinan Kabupaten Semarang 2019*; <https://semarangkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. *Berita Resmi Statistik Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Utara Maret 2020 No. 35/07/65/Th. VI, 15 Juli 2020*; <https://kaltara.bps.go.id>

_____. *Berita Resmi Statistik Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Utara September 2020 No. 73/02/65/Th. VII, 15 Februari 2021*; <https://kaltara.bps.go.id>

_____. *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara 2015–2020*; <https://kaltara.bps.go.id>

_____. *Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2021*; <https://kaltara.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020*; <https://ntt.bps.go.id>

Website Badan Pusat Statistik. *Tabel Dinamis Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen), 2019–2020*; <https://bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jl. H. Masykur RT 19, Tanjung Selor Hilir, 77212
telp: (0552) 2033254 ; email: bps6500@bps.go.id
homepage: <https://kaltara.bps.go.id>

ISBN 978-623-7914-53-2 (PDF)



9

786237

914532